

Banjir Gedebage Tak Kunjung Usai, Begini Tanggapan Sekda Kota Bandung

BANDUNG (IM) - Persoalan banjir di kawasan Gedebage hingga saat ini tak kunjung selesai. Kali terakhir, banjir kembali terjadi di kawasan tersebut pada Minggu 3 Desember 2023.

Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengaku akan segera melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).

“Betul, paling parah itu di Gedebage, tidak selesai-selesai. Saya dengan DSDABM mau merapatkan, kita harus segera mencari solusi,” kata Ema Sumarna pada Senin (11/12).

Dikemukakannya, Pemerintah Kota (Pemkot) telah melakukan upaya-upaya mengatasi banjir Gedebage. Salah satunya adalah membangun kolam retensi di area Pasar Tradisional Gedebage. Namun persoalannya,

dituturkan Ema tidak semua air yang mengalir masuk ke area kolam retensi. Sehingga air terus bergerak ke permukaan jalan nasional yang menyebabkan banjir di kawasan tersebut. “Ada upaya kita memasukan air ke kolam retensi. Tapi ternyata air itu tidak mengalir ke sana semua. Kalau saya dorong sedimentasi sungai perempatan Jalan Rumah Sakit, itu otoritas BBWS,” ucapnya.

Sehingga ditegaskan Ema, perlu adanya keterlibatan berbagai institusi untuk menyelesaikan persoalan banjir di kawasan Gedebage. Karena pihaknya sendiri, memiliki keterbatasan dan aturan.

“Artinya institusi ini harus melihat. Kalau berbicara pelayanan publik, kita harus satu dalam visi misi yang sama. Masa tiap tahun muncul genangan. Kita dimilainya tidak kerja, padahal kita bekerja,” ujar dia. ● **pra**

Pemprov Jabar-Banten Akan Gelar Rapat Polemik Truk di Parungpanjang

BOGOR (IM) - Macet panjang sempat terjadi wilayah Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, imbas sopir truk demo. Untuk itu, Pemprov Banten dan Jawa Barat akan menggelar rapat membahas hal itu.

“Parungpanjang yang kemarin kan itu yang macet jujur itu bukan terjadi sebenarnya di wilayah kita. Setelah kami cek, itu terjadi di wilayah Tangerang, namun efeknya sampai ke belakang,” kata Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan di Cibinong, Senin (11/12).

Rio mengatakan telah berkoordinasi dengan Pj Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bogor. Rencananya akan digelar rapat lintas provinsi untuk membahas polemik tersebut. “Kami kemarin sudah ketemu Pj Gubernur dan Bupati, segera akan dilaksanakan rapat lintas provinsi, yaitu antara pemerintah provinsi Jawa barat dengan Provinsi Banten,” jelasnya.

Situasi saat ini, lanjut Rio, sudah kondusif. Demo dari sopir truk sudah tidak terjadi di wilayah tersebut. Pihaknya akan mencari solusi bersama guna mengatasi permasalahan yang ada.

Penyebab Sopir Truk Demo

Sebelumnya, pihak kepolisian menjelaskan penyebab

bab sopir truk demo dari semalam hingga Senin pagi di Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para sopir truk sejak semalam meminta penjelasan uji coba jam operasional truk tambang yang baru.

“Jadi kemarin mulai 22.00 WIB menuntut Dishub menjelaskan tentang uji coba tujuh hari. Ternyata Kadishub berserta stafnya tidak datang. Jadi tidak datang itu, maka sopir-sopir beserta transporter itu memarkir kendaraan, supaya bisa komunikasi dengan Dishub,” kata Kapolsek Parungpanjang Kompol Suharto, Sabtu (9/12).

Suharto bersama pihak kecamatan setempat kemudian datang menemui para sopir truk. Mereka datang untuk memfasilitasi keinginan sopir truk. “Jadi tuntutannya apa sih, bukan domain kita, saya hanya bisa memfasilitasi tuntutannya apa sih. Akhirnya bikin pernyataan, bikin surat lagi tertulis kepada Kadishub,” jelasnya.

Suharto mengatakan telah mengurus persoalan tersebut selama empat minggu. Dia bersama pihak kecamatan setempat hanya bisa menampung aspirasi masyarakat.

“Ya mangga (silakan), saya hanya bisa menampung aspirasi Muspika ini. Nanti-nanti soal keputusan hanya ada Dishub,” ungkapnya. ● **gio**

BKPSDM Kabupaten Cirebon Kekurangan Anggaran Untuk Assesment Seluruh Pegawai

CIREBON (IM) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon mengaku terkendala melakukan assesment seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Cirebon.

Hal itu karena anggaran yang dimiliki BKPSDM setiap tahunnya hanya ada di kisaran Rp 4 milyar. Angka tersebut mencakup anggaran operasional kantor serta gaji pegawai. Demikian dikatakan Sekban BKPSDM Kabupaten Cirebon, Ade Nugroho, Senin (11/12).

Dia menyebutkan, saat ini masih ada ribuan pegawai di Pemkab Cirebon yang belum melakukan assesment. Meskipun nilai merit system dari KASN saat ini sudah mencapai 298,5 namun belum mencapai nilai sangat baik. Bila mencapai nilai itu, maka harus mencapai nilai 325.

Sementara, untuk melakukan assesment saja, diperlukan anggaran yang tidak sedikit. Saat ini, ada sekitar 5.000 guru lagi yang belum melakukan assesment. Sementara biaya yang diperlukan yaitu Rp. 100 Ribu per orang. Kalau dikalikan 5.000 guru, maka sekali assesment memakan biaya Rp 500 juta. Angka tersebut merupakan angka termurah, karena untuk assesment pegawai kesehatan, biayanya beda lagi.

“Kalau guru kan sektor yang dinilainya tidak banyak. Tapi kalau kesehatan banyak yang harus dinilai. Kita perikarakan saja, untuk assesment pegawai kesehatan sekitar Rp

300 ribu per orang,” jelas Ade. Sementara akunya, untuk tenaga kesehatan, baru 10 persennya yang sudah melakukan assesment. Ini artinya, BKPSDM harus punya anggaran besar, supaya merit system bisa dilaksanakan sepenuhnya. Karena setelah merit system berlaku, ketika ada kekosongan pegawai tinggal mengambil skor dari Box masing masing bidang.

“Kita itu melakukan rotasi mutasi sudah memakai merit system walaupun masih kategori baik. Setiap eselon itu sudah ada nilai box nya. Jadi ketika ada Kabid yang tiba-tiba naik menjadi Sekdis, itu berdasarkan box.

Meskipun pihak BKPSDM tidak bisa publish setiap eselon masuk di box berapa, namun data tersebut terintegrasi dengan KASN dan KPK. Ade kembali memastikan, tidak mungkin ada Kabid yang masuk box 2, tiba-tiba naik menjadi Sekdis, maka jangan harap ajuan tersebut di acc KASN. Karena yang bisa melakukan promosi, harus masuk di box 7,8 dan box 9.

“Semua nilai assesment yang sudah masuk box itu terintegrasi dengan KASN dan KPK. Artinya, sejak tahun kemarin kita sudah melakukan merit system. Intinya, setiap kasi, Kabid dan Sekdis sudah ada nilai dan masuk box masing-masing. Kalau ada kasi masuk box 8 dan ada kabid masuk box tiga, wajar karena level mereka juga beda,” aku Ade. ● **pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



PAMERAN SENI RUPA AKU AKAN MEMILIH

Pengunjung mengamati karya lukisan dalam pameran seni rupa Aku Akan Memilih di Gedung Karesidenan eks Bakorwil BKPP, Kota Bogor, Jabar, Senin (11/12). Pameran yang memamerkan 26 karya lukisan dari 25 perupa dan 13 karya digital mahasiswa Psikologi Persepsi Sekolah Tinggi Desain Interstudi Jakarta dan berlangsung hingga Senin (18/12) tersebut untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi Z agar lebih memahami tentang demokrasi.

BUNTUT TANAH LONGSOR DI PERUMAHAN

BPBD Bogor Minta Dilibatkan Dalam Perizinan Pembangunan Berbasis Bencana

Kedepan, BPBD Kabupaten Bogor hendaknya dilibatkan dalam perijinan pembangunan berbasis bencana, tak hanya rumah tetapi juga bangunan lainnya termasuk tanggul penahan tanah atau turap, kata Kepala Satlak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Ade Hasrat.

BOGOR (IM) - Bencana longsor di Kabupaten Bogor umumnya terjadi karena faktor alam seperti hujan deras, angin kencang, gempa bumi dan lainnya. Namun kadang juga ada unsur kelalaian ma-

nusia seperti membangun rumah di area tebing seperti yang terjadi di salah satu perumahan di Desa Kuripan, Ciseng.

Perumahan tersebut, dianggap tidak memenuhi

kajian analisa dampak lingkungan (Amdal), padahal titik bencana tanah longsor adalah wilayah berpotensi bencana.

Untuk mencegah kejadian serupa, di permukiman atau di perumahan lainnya, Kepala Satlak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Ade Hasrat berharap kedepan, jajarannya dilibatkan dalam perijinan pembangunan berbasis bencana.

“Saya mengharapkan kedepan, BPBD Kabupaten Bogor dilibatkan dalam perijinan pembangunan berbasis bencana, tak hanya rumah tetapi juga bangunan lainnya termasuk tanggul penahan

tanah atau turap,” kata Ade Hasrat kepada wartawan, Senin (11/12).

Ia menuturkan bahwa BPBD seharusnya juga punya detail peta geologis atau kontur tanah, demi memaksimalkan mitigasi bencana alam terutama bencana tanah longsor.

“Tidak semua tanah di lereng atau jurang rawan longsor, ada yang rawan bergeser atau bergerak dan ada juga yang tidak rawan. Hingga kami butuh pera kontur tanah dari instansi atau lembaga terkait seperti Badan Informasi Geospasial (BIG),” tutur Ade Hasrat.

Dari informasi yang dihimpun, sebanyak 6 unit rumah mengalami rusak berat

dan 4 unit rumah lainnya terancam bencana tanah longsor yang kejadiannya pada Jumat malam, 1 Desember lalu.

Sebanyak 8 keluarga atau 23 jiwa yang rumahnya mengalami kerusakan pun, terpaksa mengungsi ke rumah-rumah di perumahan tersebut, yang kondisinya belum diisi oleh pemiliknya.

Hujan dengan intensitas tinggi, ditambah curamnya jurang dianggap menjadi penyebab bencana tanah longsor.

Material turap setinggi 10 meter dengan lebar 10 meter, plus jalanan beton dan bangunan rumah, termasuk ikut ambruk dan jatuh ke bawah jurang. ● **gio**

PVMBG Catat Peningkatan Gempa Tektonik Lokal Di Gunung Salak Bogor

JAKARTA (IM) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Salak yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Kepala PVMBG Hendra Gunawan mengatakan gempa bumi dengan magnitudo 4,0 yang mengguncang barat daya Kota Bogor, pada Jumat (8/12) dini hari, menyebabkan gempa tektonik lokal Gunung Salak mengalami peningkatan.

“Gempa tektonik lokal mengalami peningkatan jumlah gempa di atas empat kali kejadian per hari,” ujarnya dalam laporan yang diterima di Jakarta, Senin (11/12).

PVMBG mencatat ada

delapan kejadian gempa tektonik lokal di Gunung Salak pada 6 Desember 2023, lalu tercatat sebanyak tujuh kali kejadian pada 7 Desember 2023, dan tujuh kali kejadian pada 8 Desember 2023.

Berdasarkan pengamatan kegempaan periode 1-9 Desember 2023, PVMBG mengungkapkan Gunung Salak masih didominasi gempa tektonik jauh yang terekam sebanyak 31 kali kejadian dan gempa tektonik lokal sebanyak 22 kali kejadian.

Sedangkan, gempa vulkanik sebagai indikasi aktivitas Gunung Salak tidak terekam.

“Meskipun dari kegempaan cenderung normal, namun tetap perlu diwaspadai terjadinya erupsi freatik berupa semburan lumpur atau

erupsi uap air yang dapat terjadi tiba-tiba pasca terjadinya kenaikan gempa tektonik lokal beberapa hari lalu,” kata Hendra.

Ada Tiga Zona Gempa

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga menyampaikan terdapat tiga zona aktif gempa di Jawa Barat sejak 1 November hingga 11 Desember 2023 dengan kekuatan terkecil magnitudo 1,8 dan terbesar 4,0.

“Berdasarkan hasil monitoring BMKG, tampak ada tiga zona aktif gempa di Jawa Barat sejak 1 November-11 Desember 2023,” kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Ia mengemukakan tiga zona aktif gempa itu berada

di Kabupaten Bogor, Cianjur (Sesar Cugenang), dan Sesar Garut Selatan.

Ia memaparkan untuk zona aktivitas gempa swarm di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, dan Nanggung Kabupaten Bogor telah terjadi 33 gempa swarm dengan kekuatan terkecil M1,8 dan terbesar M4,0.

“Dari 33 gempa yang terjadi, ada tiga gempa swarm dirasakan dengan magnitudo M3,0-M4,0 hingga beberapa rumah mengalami kerusakan ringan,” katanya.

Ia mengatakan gempa swarm umumnya tidak merusak, tetapi kalau sumbernya sangat dangkal maka akan berdampak meski magnitudo kecil, dan jika sering terjadi maka bangunan rumah dapat melemah.

Gempa swarm dicirikan dengan serangkaian aktivitas gempa bermagnitudo kecil dengan frekuensi kejadian yang sangat tinggi.

Untuk zona Cianjur, ia mengatakan terdapat 12 kali gempa. Sebanyak enam gempa di antaranya dirasakan dengan magnitudo M2,0 hingga M2,9.

Terkait dengan Zona Sesar Garut Selatan, Daryono mengatakan, telah memicu gempa di Kabupaten Garut-Kabupaten Bandung delapan kali dengan kisaran magnitudo M2,1 hingga M2,7 dan beberapa di antaranya dirasakan.

“Kalau masalah gempa salah satu solusinya adalah bangun rumah yang strukturnya kuat, semen jangam irit-irit, ikatan kolom dan balok harus kuat,” katanya. ● **pra**

NAIKKAN INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK

Pemkab Bogor Raih Penghargaan Anindhita Wistara Data Tingkat Nasional

BOGOR (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor meraih penghargaan Anindhita Wistara Data.

Penghargaan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Nasional sebagai Satuan Kerja dengan Index Pembangunan Statistik predikat “Baik” dengan nilai 2.60 dalam Program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023, di Rithz Carlton Hotel Jakarta, pada Senin (4/12) lalu.

Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto didampingi Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Iskandar Zulkarnain.

Kepala Diskominfo, Bayu Ramawanto menyatakan rasa syukur atas penghargaan Anindhita Wistara Data dari Badan Pusat Statistik Nasional sebagai Satuan Kerja dengan Index yang telah diraih oleh Kabupaten Bogor.

“Kami sangat bersyukur dengan penghargaan ini, hal ini menunjukkan bahwa kinerja kami sudah berjalan dengan baik dan optimal,” kata Bayu

Ia pun menambahkan, dengan penghargaan yang

terus diraih oleh Kabupaten Bogor, bukan berarti semua untuk berpuas diri tapi harus menjadi motivasi agar lebih baik ke depannya.

“Berbagai penghargaan yang kita raih harus menjadi motivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi dan terus berkembang ke depannya, penghargaan ini bukan tujuan akhir kita yang terpenting masyarakat terlayani dan kehadiran kami bermanfaat bagi masyarakat,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, untuk mencapai penghargaan kali ini beberapa upaya terus dilakukan, pertama membangun payung hukum yakni berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Dalam Perpres tersebut beberapa lembaga memiliki peran penting yakni BPS berperan sebagai pembina data, Diskominfo sebagai wali data, Bappeda sebagai forum data, dan seluruh Perangkat Daerah diseluruh Indonesia sebagai produsen data.

“Kita sebagai wali data berkewajiban dan memiliki tugas membangun data sektoral dan data real time sektoral yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan cara melakukan update



Pemkab Bogor berhasil meraih penghargaan Anindhita Wistara Data Tingkat Nasional dari Badan Pusat Statistik Nasional. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto.

data setiap hari. Alhamdulillah bisa kita laksanakan diperkuat dengan penetapan petugas data untuk mewujudkan data sektoral oleh Perangkat Daerah Dinas dan Kecamatan melalui SK Sekretaris Daerah.

Lanjut Iskandar, pihaknya juga aktif melakukan koordinasi awal melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur seperti BPS, Bappeda dan Diskominfo untuk memberikan pemahaman kepada para petugas data dalam membangun data sektoral. Ada 629 data set dari seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Bogor yang harus diupdate secara real time.

“Kita juga lakukan desk lanjutan dilaksanakan tiap tahun, itu langkah awal, tahun berikutnya mengacu pada pola yang ditetapkan, kami senantiasa melakukan implementasi sesuai dengan intruksi Kemendagri ada 2.616 data set secara nasional yang harus diujicobakan.

“Alhamdulillah hasil uji kami menjadi pilot project dan jadi yang terbaik tingkat provinsi dengan sampling data sektoral data dari Diskdik dan DPMP/ISP” ungkapnya. ● **gio**